



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



2026 LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

Pusat Standardisasi Dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan Dan Perikanan

Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan Dan Perikanan

LAPORAN KINERJA

PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

**TRIWULAN I
TAHUN 2026**



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani
Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautandan Perikanan

Ketua

Dimas Gondomarto Kusuma
Kasubag Tata Usaha

Anggota

Irwan Fakhry
Delima Agustina
Riezky Darmawan B.Wijaya
Anisa Fathir Rahman
Erki Herdian
Merissa Nur Asih
Ade Fitri Amalia
Franciscus Edi Priyono
Rizky Fauziyah Sholihah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (PSSSDMKP) Triwulan I Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban PSSSDMKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

LKj ini menguraikan rencana kinerja PSSSDMKP beserta analisis capaiannya selama Triwulan I Tahun 2026. Secara umum target kinerja PSSSDMKP yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai semua, hal ini akan menjadi bahan acuan untuk mempertahankan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Semoga LKj Triwulan I Tahun 2026 ini bermanfaat bagi masyarakat, dan sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai PSSSDMKP dalam meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya.

Jakarta, 20 April 2026
Kepala PSSSDMKP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, M.T

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR TABEL.....	8
RINGKASAN EKSEKUTIF	9
I. PENDAHULUAN	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Tujuan	17
1.3 Tugas dan Fungsi	17
1.4 Keragaan SDM	20
1.5 Potensi dan Permasalahan	24
1.6 Sistematika Laporan Kinerja	25
II. PERENCANAAN KINERJA.....	29
2.1 Rencana Strategis 2025-2029	29
2.2 Sasaran Kegiatan	32
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	34
2.5 Pengukuran Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026	36
III. AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Capaian NKO dan Sasaran Kegiatan.....	39
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	43
3.3 Akuntabilitas Keuangan PSSSDMKP Triwulan I Tahun 2026	80
3.4 Efisiensi Anggaran dan/atau Alokasi Sumber Daya PSSSDMKP Triwulan I 2026.....	84
3.5 Capaian Kinerja Lainnya	88
IV. PENUTUP	96
4.1 Capaian Indikator Kinerja.....	96
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	97

LAMPIRAN.....	99
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja PSSSDMKP (5 Januari 2026).....	100
Lampiran 2. Surat Tugas tentang Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Tim Pengelola Kinerja Pegawai PSSSDMKP Tahun 2026	103
Lampiran 4. Link Bukti Dukung Capaian Kinerja PSSSDMKP	107

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. DASHBOARD KINERJAKU TRIWULAN I TAHUN 2026 PSSSDMKP	9
GAMBAR 2. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	19
GAMBAR 3. KERAGAAN PEGAWAI PSSSDMKP TRIWULAN I TAHUN 2026	21
GAMBAR 4. KERAGAAN PEGAWAI PSSSDMKP BERDASARKAN GOLONGAN.....	23
GAMBAR 5. DASHBOARD KINERJAKU PSSSDMKP TRIWULAN I TAHUN 2026	40
GAMBAR 6. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 1 PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERSERTIFIKASI KOMPETENSI YANG TERSERAP DI DUNIA USAHA, DUNIA INDUSTRI DAN/ATAU DUNIA KERJA (DUDIKA) (%).....	49
GAMBAR 7. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 2 PERSENTASE LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI YANG TELAH TEREKOMENDASI SESUAI STANDAR (%)	53
GAMBAR 8. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 3 PERSENTASE STANDAR KOMPETENSI DAN KERANGKA KUALIFIKASI YANG DISUSUN SESUAI REGULASI YANG BERLAKU (%)	57
GAMBAR 9. CAPAIAN NILAI IKPA PSSSDMKP PER MARET 2026	62
GAMBAR 10. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 5 INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PSSSDMKP (NILAI)	62
GAMBAR 11. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 7 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN PSSSDMKP (NILAI).....	65
GAMBAR 12. CAPAIAN NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN PSSSDMKP PER MARET 2026	68
GAMBAR 13. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 8 INDEKS PROFESIONALITAS ASN PSSSDMKP (INDEKS)	72
GAMBAR 14. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 6 PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP PSSSDMKP (%)	76
GAMBAR 15. DOKUMENTASI KEGIATAN PENDUKUNG IK. 10 PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL PSSSDMKP (%).....	80
GAMBAR 16. KOORDINASI PENYIAPAN SDM AKP.....	91
GAMBAR 17. DOKUMENTASI KEGIATAN PENYIAPAN SDM AKP	94
GAMBAR 18. DASHBOARD KINERJAKU TAHUN 2026 PSSSDMKP	96

DAFTAR TABEL

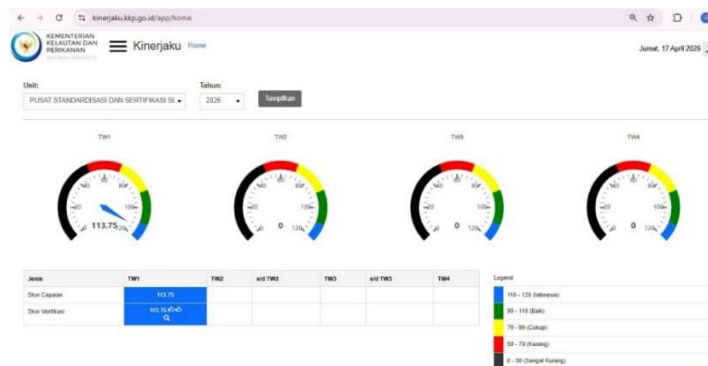
TABEL 1. KERAGAAN SDM PNS PSSSDMKP BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	21
TABEL 2. KERAGAAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN	22
TABEL 3. KERAGAAN PEGAWAI PSSSDM BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN PADA AKHIR MARET 2026	22
TABEL 4. KERAGAAN PEGAWAI PSSSDM BERDASARKAN GOLONGAN.....	23
TABEL 5. ANGGARAN BELANJA PSSSDMKP TAHUN 2026	35
TABEL 6. PERUBAHAN ANGGARAN PSSSDMKP	35
TABEL 7. CAPAIAN SASARAN KEGIATAN & INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026.....	41
TABEL 8. CAPAIAN IK 1 PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERSERTIFIKASI KOMPETENSI YANG TERSERAP DI DUNIA USAHA, DUNIA INDUSTRI DAN/ATAU DUNIA KERJA (DUDIKA) (%)	46
TABEL 9. CAPAIAN IK 2 PERSENTASE LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI YANG TELAH TEREKOMENDASI SESUAI STANDAR (%).....	51
TABEL 10. CAPAIAN IK 3 PERSENTASE LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI YANG TELAH TEREKOMENDASI SESUAI STANDAR (%).....	55
TABEL 11. CAPAIAN IK 4 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA PSSSDMKP (%).....	58
TABEL 12. CAPAIAN IK 5 INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PSSSDMKP (NILAI)	61
TABEL 13. CAPAIAN IK 6 PENILAIAN MANDIRI SAKIP PSSSDMKP (NILAI).....	64
TABEL 14. CAPAIAN IK 7 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN PSSSDMKP (NILAI)	67
TABEL 15. CAPAIAN IK 8 INDEKS PROFESIONALITAS ASN PSSSDMKP (INDEKS).70	
TABEL 16. CAPAIAN IK 9 PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP PSSSDMKP (%)	74
TABEL 17. CAPAIAN IK 10 PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL PSSSDMKP (%)	77
TABEL 18. REALISASI ANGGARAN PSSSDMKP PER MARET TAHUN 2026.....	80
TABEL 19. REALISASI ANGGARAN PER-INDIKATOR KINERJA PSSSDMKP MARET TAHUN 2026	82
TABEL 20. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PER-INDIKATOR KINERJA PSSSDMKP TRIWULAN I TAHUN 2026	85

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan gambaran capaian kinerja PSSSDMKP Triwulan I tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2026, PSSSDMKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kegiatan dan 10 Indikator Kinerja (IK). Pengukuran capaian kinerja PSSSDMKP Triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan capaian kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website, yaitu pada kinerjaku.kkp.go.id.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I tahun 2026 sebesar 113,75 (ISTIMEWA) sebagaimana dashboard Kinerjaku berikut:



Gambar 1. Dashboard Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026 PSSSDMKP

Capaian sasaran kegiatan 1 “Terselenggaranya Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan” pada Triwulan I 2026 sebesar 120%. Capaian ini berasal dari kontribusi satu indikator kinerja yakni Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%).

Capaian sasaran kegiatan 2 “Terselenggaranya Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan” pada Triwulan I 2026 sebesar 107,5%. Capaian ini berasal dari kontribusi tiga indikator kinerja yakni Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%), Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%) dan Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)

Pada triwulan I tahun 2026, dari 10 Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), terdapat 4 IK yang memiliki capaian. Adapun rincian target dan capaian kinerja IK tersebut adalah sebagai berikut:

1. IK 1 “Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%), dengan target 10 (%) dan capaian sebesar 12,61 (%) dengan persentase capaian sebesar 120%.

2. IK 4 “Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%) dengan target 86% dan capaian sebesar 86% dengan persentase capaian sebesar 100%.
3. IK 6 “Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)”, dengan target 77 dan capaian sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 120%.
4. IK 10 “Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)”, dengan target 25% dan capaian sebesar 25% dengan persentase capaian sebesar 100%.

Matriks capaian Indikator Kinerja PSSSDMKP Triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Capaian 2026				Ket
			Target 2026	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	%	
1	Terselenggaranya Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang teresap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	80	10	12,61	120	
		2 Persentase Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terekomendasi sesuai standar (%)	100	-	-	-	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target/Capaian 2026				Ket
				Target 2026	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	%	
		3	Persentase Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi yang disusun sesuai regulasi yang berlaku (%)	100	-	-	-	
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, dan Akuntabel Dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%)	86	86	86	100	
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	92,1	-	-	-	
		6	Penilaian Mandiri SAKIP PSSSDMKP (Nilai)	80	-	-	-	
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	71,75	-	-	-	
		8	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (indeks)	81	-	-	-	
		9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	77	77	100	120	
		10	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	100	25	25	100	

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/id6/view/2694/3/2026>

Keterangan

Warna

	Istimewa (nilai 110 - 120)
	Baik (nilai 90 - <110)
	Cukup (nilai 70 - < 90)
	Kurang (nilai 50 - < 70)
	Sangat Kurang (nilai <50)
	Belum ada penilaian

Secara umum capaian kinerja PSSSDMKP pada Triwulan I tahun 2026 memiliki kategori "Istimewa". Upaya yang direkomendasikan untuk pencapaian kinerja PSSSDMKP pada triwulan berikutnya yaitu melakukan seluruh rencana aksi yang tertuang pada matriks rencana aksi triwulan II Tahun 2026 dan melakukan pemantauan capaian kinerja PSSSDMKP secara berkala guna memastikan bahwa capaian Indikator Kinerja dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Alokasi anggaran PSSSDMKP pada tahun 2026 sebesar Rp 18.752.762.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 5.260.562.000, Belanja Barang sebesar Rp 12.892.200.000 serta Belanja Modal Rp 600.000.000. Realisasi anggaran PSSSDMKP sampai akhir maret Tahun 2026 yaitu sebesar Rp 1.810.246.309 (9,65 %), yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1.237.490.751 (23,52%), Belanja Barang sebesar Rp 324.505.564 (2,52 %) dan Belanja Modal sebesar Rp 248.249.994 (41,37%).

Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.



PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, dan memberikan dampak serta manfaat dari hasil yang diperoleh.

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (PSSSDMKP) Triwulan I Tahun 2026 merupakan wujud akuntabilitas kinerja PSSSDMKP atas pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran yang menguraikan dan memuat capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Acuan dalam penyusunan LKj PSSSDMKP Triwulan I Tahun 2026 antara lain, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 83 tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Berdasarkan acuan tersebut, PSSSDMKP berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu Unit Kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Kementerian Kelautan

dan Perikanan, PSSSDMKP pada tahun 2026 telah menetapkan perencanaan kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pengukuran capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026, serta menyusun LKj PSSSDMKP Triwulan I Tahun 2026 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan LKj PSSSDMKP Triwulan I Tahun 2026 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja PSSSDMKP yang telah dan seharusnya dicapai pada Triwulan I Tahun 2026;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi PSSSDMKP untuk meningkatkan kinerjanya pada triwulan berikutnya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan (PSSSDMKP) hadir sebagai institusi yang memiliki mandat untuk mengembangkan, mengoordinasikan, serta melaksanakan berbagai kebijakan di bidang pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi. Pusat ini berfungsi sebagai penghubung antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan nyata dunia usaha, industri, dan kerja (DUDIKA). Dengan demikian, standar kompetensi yang disusun tidak

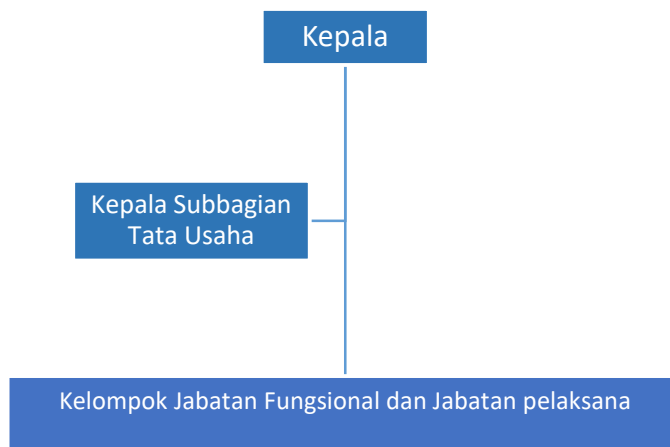
bersifat normatif semata, tetapi aplikatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar.

Fungsi dari Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan standardisasi dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan
- b. Penyusunan standar dan kebutuhan sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- c. Penyusunan standar kualifikasi kerja masyarakat kelautan dan perikanan sesuai dengan konvensi internasional dan kebutuhan nasional;
- d. Penyusunan standardisasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan
- e. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- f. Penyusunan penilaian lembaga instrumen penyelenggara uji kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan
- g. Pelaksanaan penjaminan mutu dan akreditasi lembaga penyelenggara uji kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan
- h. Pelaksanaan penjaminan mutu kualifikasi kompetensi dan profesiensi masyarakat kelautan dan perikanan
- i. Pelaksanaan pengembangan standar kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan

- j. Koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk pengembangan standardisasi dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan standardisasi dan masyarakat kelautan dan perikanan
- l. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi PSSSDMKP terdiri atas Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional. Struktur organisasi disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Tugas dari masing-masing Subbagian serta Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

3. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional, mendukung pelaksanaan kebijakan dan program kerja, menjalankan fungsi administratif, tugas rutin dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian target kerja Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

1.4 Keragaan SDM

Dukungan sumber daya manusia pada program/kegiatan Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan status kepegawaian disajikan pada Gambar 3.



Sumber: KKP Talent Overview (<https://datastudio.google.com/u/0/reporting/57d87f93-9025-4d38-8063-3fe71e2e33cf/page/OcyMF>)

Gambar 3. Keragaan pegawai PSSSDMKP Triwulan I Tahun 2026

Jumlah pegawai PSSSDMKP sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2026 yaitu 27 pegawai berstatus PNS, yang menjadi tenaga inti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, khususnya terkait perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi di bidang standardisasi dan sertifikasi SDM kelautan dan perikanan.

Tabel 1. Keragaan SDM PNS PSSSDMKP berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	SLTA	DI/D2	D3	D4	S1	S2	S3
Jumlah	2	0	1	3	5	11	5
%	8%	0%	4%	12%	19%	40%	19%

Sumber: Data Portal KKP diolah; Maret 2026

Berdasarkan Pendidikan Pegawai PSSSDMKP sebanyak 5 pegawai berpendidikan S3(19%), 11 pegawai berpendidikan S2 (40%), 5 pegawai berpendidikan S1 (19%), 3 pegawai berpendidikan DIV (11%), 1 Pegawai berpendidikan D3 (4%), dan 2 Pegawai berpendidikan SLTA (7%).

Tabel 2. Keragaan pegawai berdasarkan jenis kelamin

Pegawai	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah	%
	PNS	PPPK		
Laki laki	11	0	11	41
Perempuan	16	0	16	59

Sumber: Data Portal KKP diolah; Maret 2026

Komposisi pegawai di PSSDMKP menunjukkan keragaman gender, status kepegawaian, dan tingkat pendidikan yang mencerminkan dinamika sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Sumber daya manusia pendukung instansi sebanyak 27 orang pegawai terdiri dari 11 orang laki-laki (40,7%) dan 16 orang perempuan (59,3%).

Tabel 3. Keragaan pegawai PSSSDM berdasarkan kelompok jabatan pada Akhir Maret 2026

No	Jabatan	Jumlah
I. Struktural		
1	Kepala Pusat	1
2	Kasubag TU	1
II. JF Fungsional		
3	Instruktur Madya	2
4	Perencana Madya	1
5	Pranata Humas Madya	1
6	Perencana Muda	1
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
8	Instruktur Muda	6
9	APK APBN Ahli Muda	1
10	PK APBN Penyelia	1
11	Pranata Komputer Pertama	1
12	PK APBN Terampil	1
III. Pelaksana		
13	Penelaah Teknis Kebijakan	7
14	Pengolah data dan Informasi	1

15	Pengadministrasi Perkantoran	1
Total PNS		27
16	PPPK	0
Total Pegawai		27

Sumber: Data Portal KKP diolah; 2026

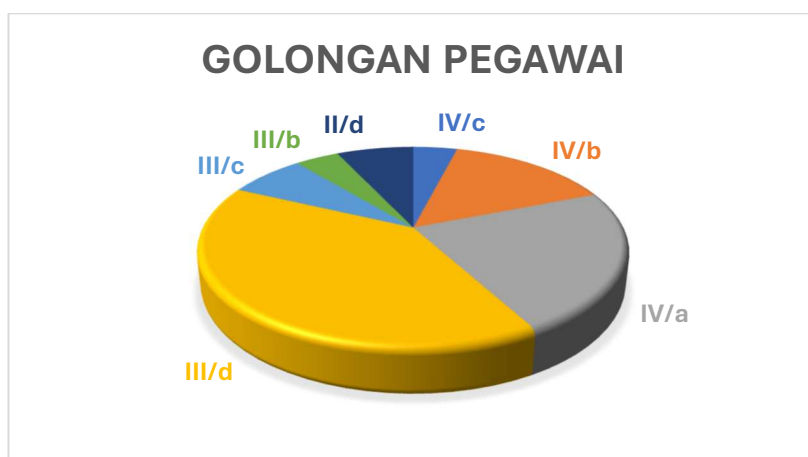
Pegawai ASN PSSSDMKP memangku Jabatan Struktural 2 orang (8%), Fungsional Tertentu/JFT 16 orang (59%) dan Jabatan Fungsional Umum/ JFU 9 orang (33%).

Pegawai PSS SDM KP berdasarkan golongan, terdiri dari IV/c sebanyak 1 orang, IV/b sebanyak 4 orang, IV/a sebanyak 6 orang, III/d sebanyak 11 orang, III/c sebanyak 2 orang, III/b sebanyak 1 orang dan II/d sebanyak 2 orang.

Tabel 4. Keragaan pegawai PSSSDM berdasarkan Golongan

Golongan	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	II/d
Jumlah	1	4	6	11	2	1	2
%	4%	15%	23 %	40%	7%	4%	7%

Sumber: Data Portal KKP diolah; Maret 2026



Gambar 4. Keragaan pegawai PSSSDMKP berdasarkan golongan.

Salah satu Indikator Kinerja (IK) terkait dengan SDM adalah IP ASN. Capaian IKU IP ASN PSSSDMKP sampai dengan akhir Maret Tahun 2026 belum bisa dilakukan pemantauan karena aplikasi masih dalam perbaikan, pemantauan pada website aplikasi IP ASN resmi milik SDMAO/ Portal KKP.

1.5 Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki oleh PSSSDMKP yaitu:

- a. Memiliki pegawai sebanyak 27 orang berstatus PNS, terdiri dari 5 pegawai berpendidikan S3(19%), 11 pegawai berpendidikan S2 (40%), 5 pegawai berpendidikan S1 (19%), 3 pegawai berpendidikan DIV (11%), 1 Pegawai berpendidikan D3 (4%), dan 2 Pegawai berpendidikan SLTA (7%).
- b. Tersedianya anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) yang tertuang dalam DIPA PSSSDMKP Tahun 2026 untuk pelaksanaan Program/Kegiatan;
- c. Terjalinnnya koordinasi, sinergi antara PSSSDMKP dengan mitra terkait (Unit Kerja lingkup KKP, Kementerian /Lembaga lainnya, Perguruan Tinggi, dll).

Sedangkan permasalahan yang dihadapi PSSSDMKP pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

- a. Keterlambatan proses penerbitan sertifikat, yang disebabkan oleh pengajuan pada akhir periode

serta gangguan pada sistem aplikasi layanan sertifikasi.

- b. Belum optimalnya integrasi sistem informasi, terutama dalam pengelolaan data peserta, perencanaan program, dan pelaporan kegiatan secara terpadu

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja PSSSDMKP Triwulan I Tahun 2026, yaitu dengan melakukan perbandingan dan analisis kinerja antara capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 terhadap target kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta mengidentifikasi factor keberhasilan dan penghambat atas capaian kinerja yang telah dicapai sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan

Berisi gambaran umum tentang PSSSDMKP (tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai) dan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang di hadapi organisasi

2. Bab II – Perencanaan Kinerja

Berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis PSSSDMKP 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja PSSSDMKP Tahun 2026 serta Pengukuran Kinerja.

3. Bab IV – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berisi analisis capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (jika ada);
- c. Menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan/ peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- d. Menganalisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. **Bab IV – Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di periode berikutnya yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. **Lampiran**

Berupa Perjanjian Kinerja, Surat Tugas Tim Teknis Tata Kelola Kinerja tahun berjalan, link bukti dukung capaian kinerja, atau dokumen pencapaian lainnya.



PERENCANAAN KINERJA

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", serta mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memainkan peran strategis dalam Trisula Pembangunan. Sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional, sektor ini berkontribusi terhadap upaya penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, peningkatan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 8 persen, serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan juga memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif. Berbagai program strategis akan diarahkan untuk:

1. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip keberlanjutan.
2. Memperkuat inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Mendorong partisipasi masyarakat pesisir dalam pembangunan ekonomi.

4. Mendukung pencapaian swasembada melalui penguatan sektor perikanan sebagai sumber ketahanan pangan nasional.

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran PSSSDMKP tetap mengacu pada Visi dan Misi KKP. Adapun Visi KKP yaitu Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;

3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Dalam melaksanakan misi KKP ke-3 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”.

BPPSDMKP mempunyai tugas menyelenggarakan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.2 Sasaran Kegiatan

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program(outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini.

BPPSDMKP telah menetapkan indikator kinerja program dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan beberapa unit organisasi setingkat Eselon II. Indikator sasaran program BPPSDM KP mengacu pada Indikator Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029.

1. Sasaran Program (SP 1) Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM KP;
2. Sasaran Program (SP 2) Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dilingkungan BPPSDM.

Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran (output) yang dibiayai oleh anggaran (input). Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara specific, measurable, achievable, reliable, and

timebond (SMART). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di BPPSDM KP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja lingkup BPPSDM KP.

Sasaran Kegiatan (SK) Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDMKP terdiri atas 2 yaitu:

Sasaran Kegiatan (SK-1) “Terselenggaranya Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Sertifikasi dan Standardisasi SDM KP Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%) dengan target sebesar 80 ;
2. Persentase Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terekomendasi sesuai standar (%) dengan target sebesar 100 ;
3. Persentase Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi yang disusun sesuai regulasi yang berlaku (%) dengan target sebesar 100.

Sasaran Kegiatan (SK-2)” Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, dan Akuntabel Dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pusat Sertifikasi dan Standardisasi SDM KP Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%) dengan target sebesar 86;
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai) dengan target sebesar 92,1;
3. Penilaian Mandiri SAKIP PSSSDMKP (Nilai) dengan target sebesar 80;
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai) dengan target sebesar 71,75;
5. Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (indeks) dengan target sebesar 81;
6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%) dengan target sebesar 77;
7. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%) dengan target sebesar 100.

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan PSSSDMKP, tahun 2026 PSSSDMKP mempunyai alokasi anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM). Adapun perkembangan anggaran sampai Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 5. Anggaran Belanja PSSSDMKP Tahun 2026

Jenis Belanja	DIPA (1 Desember 2025) (Rp)	DIPA Revisi 1 (31 Desember 2025) (Rp)	DIPA Revisi 2 (2 Maret 2026) (Rp)
Belanja Pegawai	5.260.562.000	5.260.562.000	5.260.562.000
Belanja Barang	12.907.600.000	12.907.600.000	12.892.200.000
Belanja Modal	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Pagu	18.768.162.000	18.768.162.000	18.752.762.000

Sumber: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA- NOMOR : **SP DIPA- 032.12.1.691629/2026 tanggal 1 Desember 2025**, SP DIPA- 032.12.1.691629/2026 Revisi 1 tanggal 31 Desember 2025 dan SP DIPA- SP DIPA- 032.12.1.691629/2026 Revisi 2 tanggal 2 Maret 2026

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 032.12.1.691629/2026 tanggal 1 Desember 2025, PSSSDMKP mempunyai pagu anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 18.768.162.000. Selanjutnya terbit DIPA SP DIPA- 032.12.1.691629/2026 Revisi 1 tanggal 31 Desember 2025 dengan anggaran sebesar Rp 18.768.162.000.

Selanjutnya terdapat revisi DIPA kedua dengan Nomor SP DIPA-032.12.1.691629/2026 revisi 2 pada tanggal 2 Maret 2026 dikarenakan adanya buka blokir kode-2 untuk belanja modal dan belanja barang ATK yang dialihkan ke Satker lainya. Rincian total perubahan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Perubahan anggaran PSSSDMKP

Per Program	DIPA Revisi 1 (31 Desember 2025) (Rp)	DIPA Revisi 2 (2 Maret 2026) (Rp)
Program Pendidikan dan vokasi	12.527.739	12.512.339
Program Dukungan Manajemen	6.240.423	6.240.423
Pagu	18.768.162.000	18.752.762.000

Sumber: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA SP 032.12.1.691629/2026 Revisi 2 tanggal 2 Maret 2026

2.5 Pengukuran Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026

a. Rumusan Pengukuran

Pengukuran Capaian Kinerja PSSSDMKP triwulan 1 tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja (IK), akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Jenis Indikator pada aplikasi Kinerjaku dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dimana jika Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dikelompokkan dari alokasi anggarannya, yaitu memakai alokasi anggaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen. Selain itu, pengukuran

kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator Kinerja.

b. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja PSSSDMKP dilakukan secara berkala setiap triwulan, yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (09) dan Desember (B12). Pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran adalah Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Tim Pengelola Kinerja Pegawai PSSSDMKP Tahun yang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: NOMOR B. 155/BPPSDM .5/KP.440/II/2026 tanggal 20 Februari 2026

Tim ini bertugas dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja PSSSDMKP Tahun 2026 yang meliputi kegiatan pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. Keanggotaan Tim terdiri dari Penanggung Jawab yang bertanggung jawab atas tata kelola kinerja PSSSDMKP Tahun 2026; Ketua yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan atas tata kelola kinerja PSSSDMKP Tahun 2026; dan Anggota yang menyiapkan bahan-bahan dan membantu Ketua dalam penyusunan atas tata kelola kinerja PSSSDMKP Tahun 2026.



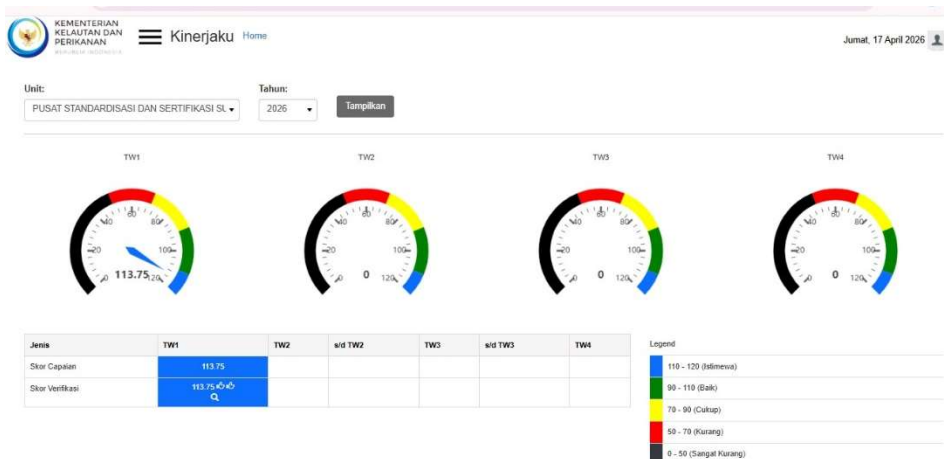
AKUNTABILITAS KINERJA

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian NKO dan Sasaran Kegiatan

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini PSSSDMKP telah membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 untuk melaksanakan kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap tiga bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh Sasaran Kegiatan (SK) yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang dikelola oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi *Kinerjaku*, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) PSSSDMKP Triwulan I Tahun 2026 mendapatkan Skor Kinerja sebesar 113,75 dengan status ISTIMEWA, sebagaimana Gambar 5 berikut:



Gambar 5. Dashboard Kinerjaku PSSSDMKP Triwulan I Tahun 2026

Capaian Sasaran Kegiatan terdiri atas Terselenggaranya Terselenggaranya Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan dengan capaian sebesar 120% dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, dan Akuntabel Dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan capaian sebesar 107,50%

Sasaran Kegiatan (SK 01) terdiri atas capaian kinerja IK 1: Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%); IK 2: Persentase Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terekomendasi sesuai standar (%); IK 3: Persentase Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi yang disusun sesuai regulasi yang berlaku (%), sedangkan Sasaran Kegiatan (SK 02) terdiri atas capaian kinerja IK 4: Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%); IK 5: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai); IK 6:

Penilaian Mandiri SAKIP PSSSDMKP (Nilai); IK 7: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai); IK 8: Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (indeks); IK 9 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%); IK 10: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)

Tabel 7. Capaian Sasaran Kegiatan & Indikator kinerja Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Target/Capaian				Ket
			Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	%	
SK.01	Terselenggaranya Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan				120	120	
1	Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	%	80	10	12,61	120	
2	Persentase Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terekomendasi sesuai standar (%)	%	100				
3	Persentase Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi yang disusun sesuai regulasi yang berlaku (%)	%	100				
SK.02	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, dan Akuntabel				107,50	107,50	

No	Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Target/Capaian				Ket
			Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	%	
	Dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						
4	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%)	%	86	86	86	100	
5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	Nilai	92,1				
6	Penilaian Mandiri SAKIP PSSSDMKP (Nilai)	Nilai	80				
7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	Nilai	71,75				
8	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (indeks)	indeks	81				
9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	%	77	77	100	120	
10	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	%	100	25	25	100	

Sumber: Kinejaku.go.id

Warna

Keterangan

	Istimewa (nilai 110 - 120)
	Baik (nilai 90 - <110)
	Cukup (nilai 70 - < 90)
	Kurang (nilai 50 - < 70)
	Sangat Kurang (nilai <50)
	Belum ada penilaian

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan IK yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan/ sasaran PSSSDMKP.

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 2 (empat) IK yang memiliki capaian dengan nilai 110 - 120 (notifikasi berwarna Biru) dan 2 (dua) IK yang memiliki capaian dengan nilai nilai 90 - <110 (notifikasi berwarna Hijau).

Evaluasi dan analisis kinerja pada Laporan Kinerja Triwulan menampilkan 5 (lima) poin analisis sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Berikut analisis capaian kinerja pada setiap Indikator Kinerja.

Sasaran Kegiatan 1 “Terselenggaranya Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan”

Sebagaimana tersaji di Tabel 7, Capaian sasaran kegiatan 1 “Terselenggaranya Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan” pada Triwulan I 2026 sebesar 120%. Capaian ini berasal dari kontribusi satu indikator kinerja yakni Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%).

Indikator Kinerja 1

Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)

Sertifikasi SDM KP adalah Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang memberikan jaminan tertulis bahwa kompetensi SDM KP telah memenuhi standard atau regulasi yang berlaku

SDM KP Tersertifikasi merupakan SDM KP yang tersertifikasi kompetensi adalah SDM KP yang telah mengikuti ujian kompetensi dan dinyatakan lulus oleh unit yang menangani standardisasi dan sertifikasi SDM KP.

Dunia usaha adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar (UMKM dan UB);

Dunia industri adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa secara massal menggunakan teknologi, mesin, dan tenaga kerja terorganisir;

Dunia kerja adalah aktivitas atau lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan, atau profesi untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun organisasi.

Serapan SDM tersertifikasi meliputi masyarakat yang telah

- a. Memperoleh pekerjaan,
- b. Meningkatkan keterampilan yang dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pekerjaan yang dimiliki saat ini (up skilling) dan/atau melanjutkan aktivitas produktif di sektor usaha dan industri dunia kerja,
- c. Membuka/mengembangkan usaha mandiri, dan/atau melanjutkan aktivitas produktif di sektor usaha dan industri dunia kerja.

Formula perhitungan Presentase SDM KP tersertifikasi kompetensi yang terserap DUDIKA adalah dengan membandingkan jumlah SDM KP tersertifikasi kompetensi yang terserap DUDIKA dengan Lulusan SDMKP tersertifikasi kompetensi, periode pelaporan Triwulan. Tabel capaian IK1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Capaian IK 1 Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)

IK 1. Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)											
Realisasi Triwulan I 2022-2025				2026					Renstra BPPSDMKP 2025 – 2029		
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029	
-	-	-	-	80	10	12,61	120,00	-	83	15,19	

Capaian Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%) pada Triwulan I Tahun 2026 dengan realisasi capaian sebesar 12,61%, capaian IK ini telah melebihi target yang ditetapkan pada triwulan I sebesar 10%, dengan prosentase capaian sebesar 120 %.

Berdasarkan Nota dinas Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDMKP No 293/BPPSDM.5/RC.610/IV/2026 tanggal 15 April 2026 perihal Penyampaian Hasil Capaian Indikator Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%) Triwulan I 2026.

Capaian IK 1 bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025, belum bisa dibandingkan karena merupakan IKU baru pada tahun 2026 di PSSSDMKP. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 yaitu sebesar 83, maka capaian pada Tahun 2026 baru sebesar 15,19%.

Apabila dibandingkan dengan Pusat Pelatihan pada IK Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) sebesar 67,94 %, nilai ini lebih tinggi dari capaian PSSSDMKP.

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan Pengawasan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan dengan Ujian
2. Pada Triwulan I tahun 2026 Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDMK KP telah menerbitkan sertifikat Lulusan SDM KP tersertifikasi kompetensi sebanyak 952 (Ankapin 647 sertifikat, dan Atkapin 305), yang terserap DUDIKA sebanyak 120 sertifikat.
3. Penerbitan Sertifikat Pembaruan Awak Kapal Perikanan (AKP). Sertifikasi pembaruan ini merupakan sertifikat untuk awak kapal perikanan yang pada awalnya diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, selanjutnya penerbitan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK, adalah :

1. Komitmen yang tinggi dari Kepala untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta koordinasi yang intensif dengan penanggung jawab IK untuk menyajikan bukti dukung capaian IK yang harus dipenuhi pada setiap triwulan.

2. Sosialisasi dan koordinasi Penyiapan Sumber Daya Manusia Awak Kapal Perikanan dalam Mendukung Program Modernisasi Kapal Perikanan
3. Koordinasi yang baik bersama stakeholder (Direktorat Teknis, DPKAKP, PUKAKP, BPPP, Pusat Pelatihan KP dan Satuan Pendidikan KP)
4. Penyusunan regulasi terkait penyelenggaraan sertifikasi AKP dan non AKP

Program/Kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Publikasi disain grafis terkait sertifikasi SDM KP
2. Pengawasan ujian kompetensi keahlian AKP untuk SDM KP
3. Rapat sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan sertifikasi baik untuk peserta didik maupun untuk masyarakat KP
4. Adanya pengembangan sistem berbasis data dan digitalisasi aplikasi AKAPI yang terintegrasi dengan Pelatihan KP mulai diperkuat untuk menunjang efektivitas layanan.

Anggaran IK ini terdapat pada rincian output Sertifikasi Profesi dan SDM dan Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.823.753.000 serta realisasi sebesar Rp 291.328.619 (4,27%)



Kegiatan Pengawasan Ujian Keahlian ANKAPIN dan ATKAPIN Tingkat II skema rewarding/penghargaan dan upgrading/peningkatan serta Ujian Keahlian ANKAPIN dan ATKAPIN Tingkat III Skema upgrading/peningkatan



Penyerahan sertifikat AN/ATKAPIN



Kegiatan sidang Yudisium penetapan kelulusan hasil pelaksanaan ujian keahlian AKP

Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 1 Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)

Indikator Kinerja 2

Persentase Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terekomendasi sesuai standar (%)

Salah satu tugas penting PSS SDMKP adalah memberikan surat rekomendasi dukungan LSP yang diperlukan untuk proses lisensi baru, perpanjangan lisensi, atau penambahan ruang lingkup skema sertifikasi. Penerbitan surat rekomendasi ini bukan sekadar proses administratif, melainkan merupakan mekanisme kontrol mutu (*quality assurance*) untuk memastikan bahwa LSP yang mengajukan permohonan telah memenuhi seluruh persyaratan teknis, operasional, dan administratif sesuai regulasi yang berlaku.

Melalui proses ini, PSS SDMKP memastikan bahwa LSP yang beroperasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki kapasitas asesmen yang memadai, asesor yang kompeten dan tersertifikasi, sistem manajemen mutu sertifikasi yang efektif, serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan skema sertifikasi yang diajukan.

Lembaga Sertifikasi Profesi merupakan Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

Rekomendasi Dukungan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberikan oleh BPPSDM KP kepada LSP KP yang mengajukan usulan rekomendasi mencakup Lisensi Calon Lembaga Sertifikasi Profesi, perpanjangan lisensi Lembaga

Sertifikasi Profesi, dan penambahan ruang lingkup Lembaga Sertifikasi Profesi.

Standar Sertifikasi LSP:

- Persyaratan yang harus dilengkapi oleh Lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNSP
- Lisensi dari BNSP mensyaratkan rekomendasi dukungan dari Pembina Sektor (BPPSDMP c.q. PSSSDMKP) sesuai dengan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 261 Tahun 2025 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Dukungan Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Kelautan dan Perikanan.

Formula perhitungan IK ini dengan cara membandingkan antara Rekomendasi Dukungan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang dikeluarkan pada tahun berjalan dengan Usulan pengajuan Rekomendasi Dukungan Lembaga Sertifikasi Kompetensi pada tahun berjalan. Periode pelaporan semester.

Tabel 9. Capaian IK 2 Persentase Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terekomendasi sesuai standar (%)

IK 2. Persentase Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terekomendasi sesuai standar (%)										
Realisasi Triwulan I 2022-2025				2026					Rancangan Indikator dan Target Kinerja PSSSDMKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-

Capaian kinerja IK 2 pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat diukur, karena periode pelaporan semester. Target IK

Persentase Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terekomendasi sesuai standar (%) sebesar 100% sesuai rancangan indikator dan target kinerja PSSSDMKP 2025-2029.

Progres kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2026 antara lain:

1. Menerbitkan surat rekomendasi dukungan untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Akuakultur Indonesia pada tanggal 13 Maret 2026, untuk permohonan penambahan ruang lingkup sebanyak 17 skema yang terdiri dari 8 skema sudah terverifikasi BNSP dan 9 skema belum terverifikasi BNSP.
2. Penyusunan Keputusan Kepala Badan PPSDM mengenai Tim Verifikasi dan Validasi Penerbitan Rekomendasi Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Kelautan dan Perikanan
3. Penyusunan Keputusan Menteri mengenai Komite Skema Sertifikasi Bersama.

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan “Sertifikasi Lembaga dan Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp 103.766.000 serta realisasi sebesar Rp 18.654.485 (17,98%).



Rapat Tim Teknis Penjaminan Mutu LSP



Pembahasan KepMen Komite Skema Sertifikasi



Rapat Tim Teknis Penjaminan Mutu LSP Pembahasan KepMen Komite Skema Sertifikasi



Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 2 Persentase Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terekomendasi sesuai standar (%)

Indikator Kinerja 3

Persentase Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi yang disusun sesuai regulasi yang berlaku (%)

Standar Kompetensi mencakup berbagai dimensi seperti pedagogik, kepribadian sosial dan professional (untuk guru/ penyuluh KP/ instruktur) serta meliputi pengetahuan, sikap kerja dan keterampilan minimal yang dibutuhkan lulusan

atau pekerja sesuai SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), SKKI (Standar Kompetensi Kerja Internasional) dan SKKK (Standar Kompetensi Kerja Khusus) agar dapat melaksanakan suatu pekerjaan sesuai kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja.

Sistem penjenjangan Kualifikasi Kompetensi SDM KP yang mengintegrasikan Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman kerja secara Nasional yang akan di diskripsikan secara detail kualifikasi tersebut dalam Peta Okupasi Nasional.

Regulasi merupakan kumpulan dasar hukum, kebijakan, dan aturan yang menjadi landasan penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi rencana strategis.

Kerangka regulasi KKNi tertuang dalam Peraturan Kepala BPPSDM KP Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPPSDMKP Tahun 2025 - 2029 dan SKKNI tertuang dalam Permen KP Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Penerbitan SKKNI telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI sedangkan penerbitan KKNi telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2014 tentang pedoman penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Formulasi perhitungan IK ini adalah:

$$S_{pr} = \left(\frac{S_{kp} + K_{kr}}{K_p + K_r} \right) \times 100\%$$

S_{pr} : Persentase Standar Kompetensi Kerja dan Kerangka Kualifikasi yang disusun sesuai regulasi yang berlaku.

S_{kp} : Standar Kompetensi kerja yang disusun tahun berjalan

K_{kr} : Kerangka kualifikasi yang disusun tahun berjalan

K_p : Target Standar Kompetensi sesuai tahun berjalan

K_r : Target Kerangka kualifikasi tahun berjalan

Tabel 10. Capaian IK 3 Persentase Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terekomendasi sesuai standar (%)

IK 3. Persentase Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi yang disusun sesuai regulasi yang berlaku (%)										
Realisasi Triwulan I 2022-2025				2026					Rancangan Indikator dan Target Kinerja PSSSDMKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-

Capaian kinerja IK 3 pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat diukur, karena periode pelaporan tahun. Target IK Persentase Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi yang disusun sesuai regulasi yang berlaku (%) sebesar 100% sesuai rancangan indikator dan target kinerja PSSSDMKP 2025 - 2029.

Progres kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2026 antara lain:

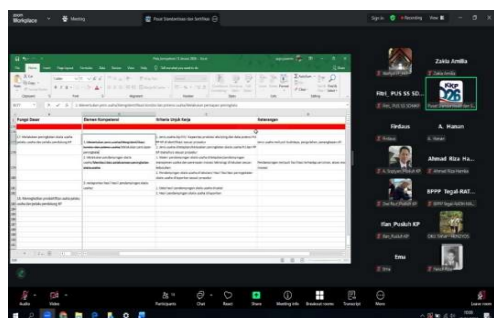
1. Penyusunan Identifikasi Peta Kompetensi SKKNI Penyuluhan
2. Koordinasi penyusunan RSKKNI serta perumusan unit kompetensi penyuluhan kelautan dan perikanan

3. Koordinasi penguatan implementasi kebijakan pengelolaan penyuluhan kelautan dan perikanan guna mendukung penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)
4. Finalisasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
5. Klarifikasi penerapan pendampingan surveillance pada proses sertifikasi produk pada pelaku usaha perikanan.

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan “Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria” dan Peraturan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 198.726.000 serta realisasi sebesar Rp 34.580.500 (17,40%).



Koordinasi penguatan implementasi kebijakan pengelolaan penyuluhan



Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 3 Persentase Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi yang disusun sesuai regulasi yang berlaku (%)

Sasaran Kegiatan 2 “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, dan Akuntabel Dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”

Sebagaimana tersaji di Tabel 7, Capaian sasaran kegiatan 2 “Terselenggaranya Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan” pada Triwulan I 2026 sebesar 107,5%. Capaian ini berasal dari kontribusi tiga indikator kinerja yakni Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%), Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%) dan Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)

Indikator Kinerja 4

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon II lingkup BPPSDMKP. Bagi Satker yang tidak diuji petik Pengawasan oleh Itjen, maka nilai capaian Satker yang diperoleh maksimal sebesar 85 (sesuai target) dengan persentase capaian sebesar 100%.

Periode pelaporan IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%) adalah Triwulan. Formula perhitungan Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%) yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Eselon II}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon II}} \times 100\%$$

Capaian IK 4 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian IK 4 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%)

IK 4. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%)											
Realisasi Triwulan I 2022-2025				2026					Renstra BPPSDMKP 2025 – 2029		
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029	
-	-	-	-	86	86	86	100	-	89	96,63	

Capaian kinerja IK 4 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%), dari target 86 dengan capaian sebesar 86, persentase capaian sebesar 100%, sampai dengan Triwulan I tidak ada pengawasan internal KKP untuk satker PSSSDMKP.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat BPPSDMKP Nomor 1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tanggal 14 April 2026 perihal Capaian IKU "Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2026 Lingkup BPPSDMKP

Capaian IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%) tidak bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena merupakan IK baru. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu sebesar 89, maka capaian pada Triwulan 1 Tahun 2026 belum mencapai target sebesar 96,63.

Apabila dibandingkan dengan satker Lingkup BPPSDMKP yang memiliki IK sejenis yaitu Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dengan target yang sama (77), dan memiliki capaian yang sama (100) dengan persentase capaian 100%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK ini yaitu:

- 1) Komitmen Kepala Pusat dan pegawai untuk meminimalisir temuan dan percepatan
- 2) Terlaksananya administrasi keuangan dan perbendaharaan yang baik.
- 3) Antisipasi permasalahan atau adanya kesalahan dalam administrasi.
- 4) Sistem pengawasan internal yang efektif bagi peningkatan kinerja.

Program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian IK ini diantaranya:

Melakukan koordinasi dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan serta penyedia agar kegiatan berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan “Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan BPPSDMKP” dengan pagu anggaran sebesar Rp 38.506.000 serta realisasi sebesar Rp 13.259.005 (34,43%).

Indikator Kinerja 5

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga atas kesesuaian terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Capaian IK 5 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian IK 5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

IK 5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)										
Realisasi Triwulan I 2022-2025				2026					Renstra BPPSDMKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	92,1	-	-	-	-	92,25	-

Capaian kinerja IK 5 pada Triwulan I Tahun 2026, belum bisa diukur karena pengukuran periode semester dengan target IK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai) tahun sebesar 92,1 dan target 2029 sesuai Renstra BPPSDMKP 2025 – 2029 sebesar 92,25.

Capaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada IK ini adalah:

1. Monitoring perkembangan IKPA setiap Triwulan,
2. Penyusunan RPD, menjaga penyerapan anggaran sesuai dengan RPD yang telah disusun,
3. Penginputan capaian output pada saat setelah dilakukan asesment RO eselon I.
4. Melakukan koordinasi antara pimpinan dengan ketua tim kerja, dan penanggung kerja kegiatan.
5. Melakukan akselerasi belanja kontraktual dalam rangka penyerapan anggaran

6. Melakukan penyelesaian tagihan yang timbul sesuai norma waktuyang telah ditentukan.
7. Menyelenggarakan GUP sesuai dengan ketentuan



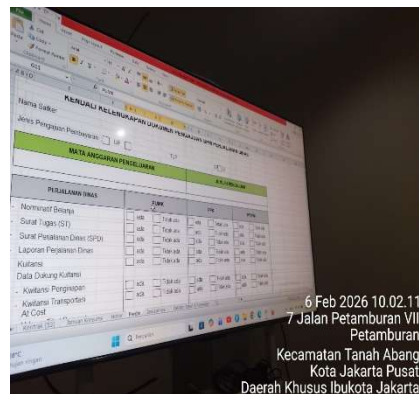
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Unsur Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	03 Maret	175	032	691626	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,00 10 10,20	84,00	0,00 20 0,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	75,00	0,00 20 0,00	0,00	50,20	100,00%	0,00	50,20

Sumber: MyIntress dan SAKTI Kementerian Keuangan Maret Tahun 2026
Gambar 9. Capaian Nilai IKPA PSSSDMKP per maret 2026

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan “Layanan Manajemen Keuangan” dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.995.000 serta telah direalisasikan sebesar Rp 2.550.000 (36,45%).



Ket: Rapat koordinasi internal terkait Rencana Penarikan Dana

Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

Indikator Kinerja 6

Penilaian Mandiri SAKIP PSSSDMKP (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri KP No. 68 Tahun 2017 tentang SAKIP, tujuan pelaksanaan SAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan disertai alat bukti. SAKIP membantu kita untuk memberikan pedoman proses/tahapan pencapaian tujuan organisasi yang valid, measurement, dan akuntable, serta memberikan informasi kepada kita posisi pencapaian kinerja yang telah dihasilkan.

Penilaian Mandiri SAKIP PSSSDMKP (Nilai) merupakan Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Formula perhitungan Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh

Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Tabel 13. Capaian IK 6 Penilaian Mandiri SAKIP PSSSDMKP (Nilai)

IK 6. Penilaian Mandiri SAKIP PSSSDMKP (Nilai)											
Realisasi Triwulan I 2022-2025				2026					Renstra BPPSDMKP 2025 – 2029		
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029	
-	-	-	-	80	-	-	-	-	88,8	-	

Capaian kinerja IK 6 pada Triwulan I Tahun 2026, belum bisa diukur karena pengukuran periode tahun dengan target IK Penilaian Mandiri SAKIP PSSSDMKP (Nilai) tahun sebesar 80 dan target 2029 sesuai Renstra BPPSDMKP 2025 – 2029 sebesar 88,8.

Capaian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah;

1. Menyusun dokumen Perencanaan Tahun 2026
2. Melaksanakan pengukuran kinerja Triwulan I 2026
3. Menyusun evaluasi rencana aksi Triwulan I 2026

4. Mengunggah dokumen-dokumen perencanaan ke dalam website <https://esr.menpan.go.id/>, seperti PK, Manual IKU, Rencana Aksi, Rincian Target IKU Tahun 2026.
5. Penginputan capaian kinerja Triwulan Tahun 2026 ke dalam aplikasi Kinerjaku KKP melalui link kinerjaku.kkp.go.id/.
6. Pengunggahan data dukung capaian pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026.



Penyelarasan dokumen Perencanaan dan pengukuran kinerja lingkup PSSSDMKP tahun 2026



Finalisasi Dokumen kinerja lingkup PSSSDMKP Tahun 2026



Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 Level II dan I lingkup BPPSDM



Verifikasi dan Validasi Capaian Kinerja Level II dan Pengukuran Kinerja Level I BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2026

Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

Indikator Kinerja 7

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya

- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
 - d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
 - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai) menggunakan periode pelaporan tahun.

Tabel 14. Capaian IK 7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)

IK 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)										
Realisasi Triwulan I 2022-2025				2026					Renstra BPPSDMKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	71,75	-	-	-	-	82,5	-

Capaian kinerja IK 7 pada Triwulan I Tahun 2026, belum bisa diukur karena pengukuran periode tahun dengan target IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai), target tahun sebesar 71,75 dan target 2029 sesuai Renstra BPPSDMKP 2025 – 2029 sebesar 82,5. Capaian NKPA sampai maret 2026 sebesar 0.

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dapat dilihat pada aplikasi monev kemenkeu <https://monev.kemenkeu.go.id/>.



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efisiensi		
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	202-12.000000	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/app2026/satker/nkasatker> per Maret Tahun 2026

Gambar 12. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP per Maret 2026

Capaian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah;

1. Penyusunan revisi anggaran;
2. Melakukan konsultasi dengan pengelola anggaran BPPSDM KP
3. Menghadiri pertemuan terkait efisiensi anggaran secara daring dengan BPPSDM KP terkait update ketentuan efisiensi anggaran.

4. Melakukan penyerapan anggaran yang konsisten dengan DIPA.
5. Melakukan penginputan capaian output di setiap awal bulan pada aplikasi SAKTI yang akan otomatis terinput ke dalam aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id/>

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan “Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (sub komponen 2) dengan pagu anggaran sebesar Rp18.709.000 serta realisasi sebesar Rp 5.690.000 (30,41%).

Indikator Kinerja 8

Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (indeks)

IK Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pada ketentuan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, profesionalitas didefinisikan sebagai kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugaspekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. Lebih lanjut, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang

menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

1. Dimensi Kualifikasi, yang digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
2. Dimensi Kompetensi, untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
3. Dimensi Kinerja, yang digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN; serta
4. Dimensi Disiplin, untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima ASN.

Tabel 15. Capaian IK 8 Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (indeks)

IK 8. Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (indeks)											
Realisasi Triwulan I 2022-2025				2026					Renstra BPPSDMKP 2025 – 2029		
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029	
-	-	-	-	81	-	-	-	-	83	-	

Capaian kinerja IK 8 pada Triwulan I Tahun 2026, belum bisa diukur karena pengukuran periode semester dengan target IK Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (indeks) tahun sebesar 81 dan target 2029 sesuai Renstra BPPSDMKP 2025 – 2029 sebesar 83, Capaian Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (indeks) dapat dilihat pada dengan website <https://ipasn.sdmao.id/ip-asn/2025/>.

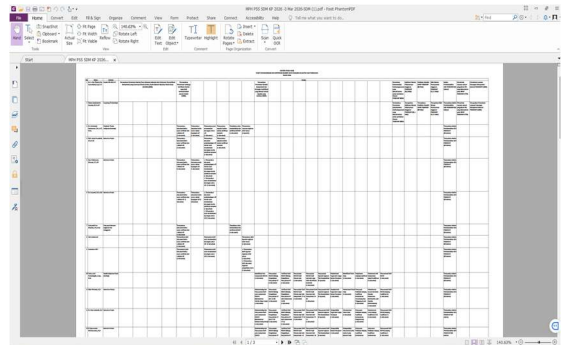
Progres kegiatan sampai dengan maret tahun 2026 antara lain:

1. Memberikan informasi dan dorongan kepada pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh instansi baik lingkup KKP maupun K/L lainnya dan dibuktikan dengan data dukung berupa sertifikat yang diinput ke; <https://myasn.bkn.go.id/dashboard>
2. Dialog kinerja dan penyusunan MPH lingkup PSSSDMKP tahun 2026
3. Berkoordinasi dengan Biro SDMAO terkait kualifikasi pendidikan IP ASN.
4. Melakukan koordinasi, verifikasi dan validasi terkait data dukung capaian yang diinput ke masing-masing SKP pegawai.
5. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian IP ASN masing-masing pegawai.

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan Manajerial “Layanan Manajemen SDM: 1) Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur BPPSDMKP; 2) Pelayanan Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur” dengan pagu anggaran sebesar Rp 14.643.000 serta realisasi sebesar Rp 2.040.000 (13,93%).



Rapat Dialog Kinerja dan Penyusunan MPH lingkup PSSSDMKP



Penyusunan Marik Peran Hasil Pegawai Lingkup PSSSDMKP

Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 8 Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (Indeks)

Indikator Kinerja 9

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase

RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja).

Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\text{Persentase RU PBJ yang diumumkan} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Capaian kinerja IK 9 pada Tahun 2026 diukur menggunakan periode pengukuran triwulan.

Tabel 16. Capaian IK 9 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)

IK 9. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)										
Realisasi Triwulan I 2022-2025				2026					Renstra BPPSDMKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	77	77	100	120,00	-	84	119,05

Capaian kinerja IK 9 persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP, dari target 77 dengan capaian sebesar 100, persentase capaian sebesar 120%, sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat BPPSDMKP NOMOR 1428/BPPSDM.1/PL.410/IV/2026 tanggal 13 April 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I TA. 2026.

Capaian IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%) tidak bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena merupakan IK baru. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu sebesar 84, maka capaian pada Triwulan 1 Tahun 2026 sudah melebihi target sebesar 119,05.

Apabila dibandingkan dengan satker Lingkup BPPSDMKP yang memiliki IK sejenis yaitu Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dengan target yang sama (77), dan

memiliki capaian yang sama (100) dengan persentase capaian 120%.

Capaian IK 6 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK ini yaitu:

- 1) Kecepatan dalam mengurus permintaan user pasword pada aplikasi SIRUP.
- 2) Adanya komitmen yang tinggi dari Kepala PSSSDMKP dan penanggung jawab IK untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan serta penyedia agar kegiatan berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku

Program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian IK ini diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan serta penyedia agar kegiatan berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku,
2. Melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan “Layanan Umum: Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Pelatihan” dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.557.000 serta realisasi sebesar Rp 170.000 (4,78%).



Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)

Indikator Kinerja 10

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)

Kegiatan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Capaian kinerja IK ini pada Triwulan I Tahun 2026 diukur menggunakan periode pengukuran triwulan. Layanan dukungan manajemen internal PSSSDMKP terdiri dari:

1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
2. Layanan Data dan Informasi
3. Layanan Perkantoran

Formula pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun

berjalan dengan Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan sebagai Persentase layanan dukungan manajemen internal.

Tabel 17. Capaian IK 10 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)

IK 10 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)										
Realisasi Triwulan I 2022-2025				2026					Renstra BPPSDMKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	100	25	25	100,00	-	100	25

Capaian persentase layanan dukungan manajemen Internal PSSSDMKP pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 25% dari target yang ditetapkan sebesar 25% (capaianya sebesar 100%).

Bukti capaian IK 10 bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025, belum bisa dibandingkan karena merupakan IKU baru pada PSSSDMKP. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu sebesar 100, maka capaian pada tahun 2026 bernilai sama.

Apabila dibandingkan dengan Satker lingkup BPPSDMKP yang memiliki IK sejenis yaitu Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) dengan target tahunan sebesar 100%, dan memiliki capaian yang sama sebesar 100%.

Capaian kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Telah dilaksanakan Pelaksanaan publikasi, peliputan dan dokumentasi tugas dan fungsi PSSSDMKP
2. Publikasi narasi tunggal tematik dan campaign kinerja KKP dan kolaborasi lintas akun instansi memperkuat positioning PSSSDMKP sebagai unit kerja yang adaptif, relevan, dan terbuka terhadap sinergi.
3. Publikasi narasi tunggal tematik dan kolaborasi lintas akun instansi memperkuat positioning PSSSDMKP sebagai unit kerja yang adaptif, relevan, dan terbuka terhadap sinergi.
4. Secara umum, pelaksanaan Layanan Perkantoran telah berjalan sesuai rencana dan regulasi dalam hal pemenuhan hak-hak pegawai dan kebutuhan dasar operasional, namun realisasi anggarannya menunjukkan bahwa masih banyak alokasi yang belum terserap.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK, adalah:

- 1) Komitmen yang tinggi dari Kepala untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta koordinasi yang intensif dengan penanggung jawab IK untuk menyajikan bukti dukung capaian IK yang harus dipenuhi pada setiap triwulan
- 2) Komitmen dari Tim Manajerial terkait untuk penyelesaian dan pengumpulan data dukung yang menjadi target Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP pada Triwulan ini.

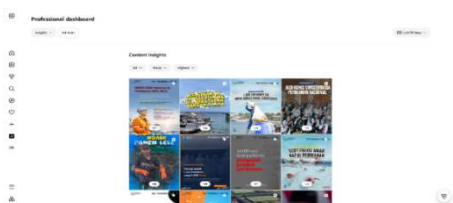
Program/Kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Melakukan penyusunan laporan capaian IKU, untuk kegiatan manajerial Triwulan I Tahun 2026 PSSSDMKP dikompilasi dan difinalisasi menjadi Laporan Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP.
2. Melaksanakan rapat internal untuk memonitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan PSSSDMKP.
3. Melakukan koordinasi dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan agar kegiatan berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku.

Anggaran IK ini terdapat pada kegiatan: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Layanan Data dan Informasi serta Layanan Perkantoran: 1) Gaji dan Tunjangan, 2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.139.780.000 serta realisasi sebesar Rp 1.438.581.846 (23,43%).



Rapat Koordinasi Internal lingkup PSSSDMKP



Penyebaran konten media sosial



Pemantauan Interaksi Publik konten media sosial

Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK. 10 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)

3.3 Akuntabilitas Keuangan PSSSDMKP Triwulan I Tahun 2026

Realisasi anggaran PSSSDMKP sampai dengan akhir Maret Tahun 2026 sebesar Rp 1.810.246.309 (9,65%). Realisasi anggaran per jenis belanja disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Anggaran PSSSDMKP per Maret Tahun 2026

No	Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	5.260.562.000	1.237.490.751	23,52
2	Belanja Barang	12.892.200.000	324.505.564	2,52
3	Belanja Modal	600.000.000	248.249.994	41,37
Jumlah		18.752.762.000	1.810.246.309	9,65

Sumber: Data MyIntress dan SAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan akhir Maret 2026

Realisasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1.237.490.751, belanja barang sebesar Rp 324.505.564, dan belanja modal sebesar Rp 248.249.994. Anggaran pada belanja pegawai digunakan untuk keperluan belanja pegawai yaitu untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan pegawai PSSSDMKP, serta belanja barang digunakan untuk membiayai Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Kegiatan 1 yaitu Sasaran Kegiatan “ Terselenggaranya Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan ”, memiliki pagu anggaran sebesar Rp 7.126.245.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp 344.563.604 (4,84%).

Sasaran Kegiatan 2 yaitu Sasaran Kegiatan “ Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, dan Akuntabel Dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ”, memiliki pagu anggaran sebesar Rp 6.240.423.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.465.682.705 (23,49%).

Selanjutnya, realisasi anggaran per-Indikator Kinerja PSSSDMKP maret Tahun 2026 disajikan dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Anggaran per-Indikator Kinerja PSSSDMKP
Maret Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI %
1	Terselenggaranya Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	6.823.753.000	291.328.619	4,27
		2	Persentase Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terekomendasi sesuai standar (%)	103.766.000	18.654.485	17,98
		3	Persentase Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi yang disusun sesuai regulasi yang berlaku (%)	198.726.000	34.580.500	17,40
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, dan Akuntabel Dalam Penyuluhan dan Pengembangan	4	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk	38.506.000	13.259.005	34,43

	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		perbaikan kinerja PSSSDMKP (%)			
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	6.995.000	2550000	36,45
		6	Penilaian Mandiri SAKIP PSSSDMKP (Nilai)	18.233.000	3.391.900	18,60
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	18.709.000	5.690.000	30,41
		8	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (indeks)	14.643.000	2.040.000	13,93
		9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	3.557.000	170.000	4,78
		10	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	6.139.780.000	1.438.581.846	23,43
			Total	18.752.762.000	1.810.246.355	9,65

Sumber: Data MyIntress dan SAKTI Kementerian Keuangan Maret Tahun 2026

Upaya pencapaian kinerja PSSSDMKP pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

3.4 Efisiensi Anggaran dan/atau Alokasi Sumber Daya PSSSDMKP Triwulan I 2026

- **Analisis Efisiensi Anggaran**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/ kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Pengukuran Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi

unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Berdasarkan perhitungan, nilai efisiensi anggaran PSSSDMKP Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 104,10%. Efisiensi tersebut merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan kegiatan PSSSDMKP melalui koordinasi dan integrasi antara Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja, dan komitmen bersama seluruh pegawai untuk terus berbenah diri dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Efisiensi penggunaan Anggaran per-Indikator Kinerja PSSSDMKP Triwulan I Tahun 2026

N O	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINER JAKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI %	EFISIE NSI (%)
1	Terselenggara ranya Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tersertifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	120	6.823.753.000	291.328.619	4,27	115,73
		2	Persentase Lembaga Sertifikasi Profesi		103.766.000	18.654.485	17,98	-17,98

N O	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINER JAKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI %	EFISIE NSI (%)
			yang telah terekomendasi sesuai standar (%)					
		3	Persentase Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi yang disusun sesuai regulasi yang berlaku (%)		198.726.000	34.580.500	17,40	-17,40
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, dan Akuntabel Dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%)	100	38.506.000	13.259.005	34,43	65,57
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)		6.995.000	2550000	36,45	-36,45
		6	Penilaian Mandiri SAKIP PSSSDMKP (Nilai)		18.233.000	3.391.900	18,60	-18,60
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)		18.709.000	5.690.000	30,41	-30,41
		8	Indeks Profesionalitas ASN		14.643.000	2.040.000	13,93	-13,93

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINER JAKU	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI %	EFISIE NSI (%)
		PSSSDMKP (indeks)					
		9 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)		3.557.000	170.000	4,78	115,22
		10 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	100	6.139.780.000	1.438.581.846	23,43	76,57
		Total	113,75	18.752.762.000	1.810.246.355	9,65	104,10

Sumber: Diolah dari Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan , Maret 2026

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan efisiensi ke depan sbb:

1. Melakukan perhitungan kembali secara detil kebutuhan per belanja, khususnya belanja pegawai sebagai proporsi anggaran terbesar agar cukup sesuai kebutuhan dan tidak mengganggu proporsi anggaran BPPSDM untuk berkinerja;
2. Mencantumkan output kegiatan yang sekiranya sudah dapat diperoleh (khususnya pada RO dengan satuan Layanan) sehingga nilai efisiensi dari sasaran program

pada NKA tidak tercatat minus sepanjang tahun (tidak berkinerja);

3. Melakukan pengecekan kembali informasi indikator kinerja pada aplikasi Monev kemenkeu untuk memastikan indikator dan target volume yang diinput tersaji dengan baik; dan
4. Melakukan pengawalan penyajian data kinerja yang update dan valid melalui kegiatan rekonsiliasi kinerja data NKA dan capaian output SAKTI secara berkala untuk menjaga nilai konsistensi capaian kinerja anggaran, dan melaporkan capaian output secara tepat waktu pada aplikasi SAKTI dan OMSPAN;
5. Meminimalisir terjadinya anomali data capaian output pada saat pengisian data di aplikasi SAKTI.

3.5 Capaian Kinerja Lainnya

Disamping capaian indikator kinerja yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan antara lain:

- 1) Penyiapan SDM Awak Kapal Perikanan (AKP) dalam Mendukung Program Modernisasi Kapal Perikanan

Koordinasi penyiapan Sumber Daya Manusia Awak Kapal Perikanan telah dilakukan secara intensif dan

berkelanjutan sebagai langkah untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kebutuhan, serta merumuskan rencana tindak lanjut dalam penyiapan SDM AKP secara nasional. Kegiatan penyiapan SDM Awak Kapal Perikanan ini bersifat multiyear, yang akan berlangsung dari tahun 2026 hingga 2028.

Pada tahun 2026, program modernisasi kapal perikanan akan mendukung 50 kapal ikan modern 30GT sebanyak 500 Awak kapal. Awak kapal perikanan tersebut diprioritaskan dipenuhi dari lulusan satuan pendidikan KP. Pada tahun berikutnya adalah melanjutkan program modernisasi kapal perikanan 30 GT dengan dukungan SDM AKP sebanyak 9.500 awak kapal, kapal perikanan 200 GT dengan 9.469 awak kapal, dan kapal perikanan 500 GT dengan 625 awak kapal. Sebanyak 10.000 AKP yang akan mendukung kapal perikanan 30 GT tersebut dipenuhi dari masyarakat perikanan, alumni satuan pendidikan KKP, dan alumni satuan pendidikan non KKP (DIKTI/ DIKDASMEN).

Mekanisme perekrutan calon AKP adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi potensi SDM, penyusunan jadwal pelatihan dan pembuatan aplikasi rekrutmen SDM (bulan Januari-Maret)
- b. Sosialisasi dan pendaftaran AKP (bulan April-Mei)
- c. Seleksi calon AKP pada tahap awal (pemberkasan) (bulan Juni

- d. Verifikasi, pengumuman hasil seleksi Tahap 1 dan masa sanggah (bulan Juli)
- e. Seleksi tahap kedua (tes kesehatan dan wawancara)
- f. Terlaksananya pelatihan, familiarisasi dan bela negara bagi calon AKP (Agustus- November 2026)
- g. Penempatan calon AKP di kapal ikan modern (November – Desember 2026)

Arahan Kepala Badan dalam pelaksanaan program prioritas ini ditekankan bahwa program tidak dapat dilakukan secara parsial. Penyiapan SDM AKP, bioflok, mina padi, dan program lainnya harus berada dalam satu kerangka besar yang terintegrasi agar fasilitas yang terbatas tidak saling berbenturan dan seluruh kegiatan dapat terakomodasi.

Untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan :

- 1) kesatuan framework terpadu untuk seluruh program penyiapan SDM (AKP, Waingapu, bioflok, mina padi, dan lainnya),
- 2) Target awal modernisasi kapal sebanyak 50 kapal dengan kebutuhan 600 awak kapal tetap menjadi prioritas,
- 3) Ketersediaan sarana prasarana dan kapal latih masih belum mencukupi dan memerlukan alternatif solusi,
- 4) Koordinasi lintas unit termasuk DJPT dan asosiasi pemilik kapal, menjadi kunci keberhasilan program,
- 5) Sistem informasi berbasis aplikasi diperlukan untuk mendukung transparansi dan pelaporan kepada pimpinan.



Gambar 16. Koordinasi Penyiapan SDM AKP untuk modernisasi kapal perikanan

2) Penyusunan Regulasi terkait Sertifikasi Awak Kapal Perikanan (AKP)

Bidang sertifikasi telah menyusun draft Keputusan Menteri tentang Komite Pengesahan AKP dan draft penyesuain Standar Mutu AKP Amandemen STCW-F Code 2024. Terkait dengan penyusunan draft Keputusan Menteri tentang Komite Pengesahan AKP terdapat beberapa aspek strategis yang secara substantif menjadi fokus pembahasan antara lain: aspek hukum dan kelembagaan, ruang lingkup tugas komite, mekanisme audit, struktur dan keanggotaan, serta ruang lingkup pengaturan. Pembentukan Komite merupakan amanat regulasi sehingga perlu disusun sesuai hierarki peraturan perundang-undangan dan memitigasi potensi risiko hukum.

Kegiatan penyusunan dan penyesuaian Standar Mutu AKP Amandemen STCW-F Code 2024 telah menyepakati beberapa hal dan menghasilkan rumusan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan penyesuaian dan penyelarasan kurikulum pelatihan pada seluruh program diklat keahlian dan keterampilan (Nautika, Teknik, Rating, dan BST-F), termasuk peningkatan beban pembelajaran, penyempurnaan struktur kurikulum, serta penyesuaian redaksi dan referensi regulasi internasional dan nasional yang berlaku.
- 2) Disepakati penyesuaian persyaratan peserta pelatihan, antara lain terkait pengalaman kerja, usia minimal, sertifikasi keterampilan, serta kelengkapan administrasi peserta, dengan memperhatikan kemudahan akses tanpa mengurangi standar kompetensi.
- 3) Ditetapkan mekanisme perolehan sertifikat kompetensi dapat diperoleh melalui mekanisme peningkatan, pembentukan, dan updating, penyesuaian (adjusting) sesuai ketentuan yang berlaku sesuai jenjang dan kualifikasi masing-masing program pada Nautika maupun Teknik.
- 4) Disepakati untuk ANKAPIN dan ATKAPIN level 1 hanya dapat diperoleh dengan mekanisme peningkatan dan updating, dan penyesuaian

(adjusting) sesuai ketentuan yang berlaku. sementara level dibawahnya dapat diperoleh dengan 2 mekanisme yaitu pembentukan maupun peningkatan.

- 5) Penyesuaian kurikulum dalam level manajemen, operasional dan supporting sesuai dengan amandemen STCWF code 2024 dalam MSC 562.
- 6) Dilakukan penyeselarasan standar pelatih/instruktur/penguji, dengan ketentuan minimal kepemilikan sertifikat setara atau di atas level pelatihan yang diajarkan serta pengalaman mengajar sesuai bidangnya yang akan dilakukan melalui pelatihan updating ANKAPIN 1 dan ATKAPIN 1 dengan rencana pembiayaan dari Pusat Pelatihan dan/atau Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDMKP.
- 7) Beberapa hal yang belum disepakati secara final, khususnya terkait penambahan jenis sertifikat keterampilan tertentu pada persyaratan peserta pelatihan, akan ditindaklanjuti melalui konsultasi lanjutan dengan pemangku kepentingan terkait sebelum ditetapkan dalam standar mutu final.
- 8) Pelaksanaan amandemen STCWF code 2024 ini diusulkan mulai direalisasikan pada tanggal 1 Juli 2026, setelah kesiapan pelatih dan sistem

pelatihan termasuk standar mutunya sudah disahkan oleh KKP.



Penyusunan rencana kebutuhan
AKP 200 dan 500 GT

Penyusunan dokumen matrik
pemantauan dan monitoring
program prioritas BPPSDM Tahun 2026

Gambar 17. Dokumentasi kegiatan Penyiapan SDM AKP
untuk modernisasi

3) Kegiatan Sertifikasi Non Awak Kapal Perikanan

- 1) Pembahasan pendahuluan rencana sertifikasi kompetensi SDM sektor KP untuk mendukung Sistem Jaminan Mutu (SISJAMU)
- 2) Koordinasi dan Sinergi terkait Standardisasi dan Sertifikasi Bidang Konservasi
- 3) koordinasi pelaksanaan sertifikasi peserta didik Tahun 2026
- 4) Koordinasi dan Peningkatan Sinergitas PSS SDM KP dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Ketiga Sektor Kelautan dan Perikanan



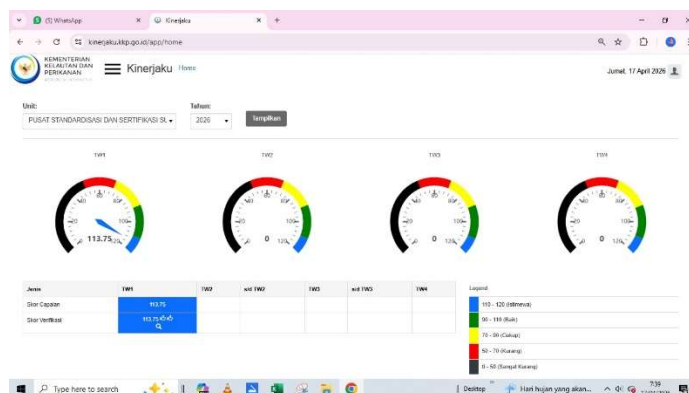
PENUTUP

IV. PENUTUP

4.1 Capaian Indikator Kinerja

Laporan Kinerja PSSSDMKP Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PSSSDMKP, serta sebagai sarana untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pada tahun 2026, Pada Triwulan I Tahun 2026 PSSSDMKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja.

Secara umum, capaian kinerja PSSSDMKP menunjukkan hasil yang sangat positif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2026 sebesar 113,75 (ISTIMEWA) sebagaimana dashboard Kinerjaku berikut:



Gambar 18. Dashboard Kinerjaku Tahun 2026 PSSSDMKP

Capaian ini mencerminkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran PSSSDMKP dalam meningkatkan kualitas layanan internal, mendukung efisiensi pelaksanaan anggaran, serta memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum target kinerja yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2026 telah tercapai dan dalam kategori “Istimewa”, Namun demikian, dalam prosesnya terdapat permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target antara lain:

- a. Keterlambatan proses penerbitan sertifikat, yang disebabkan oleh pengajuan pada akhir periode serta gangguan pada sistem aplikasi layanan sertifikasi.
- b. Belum optimalnya integrasi sistem informasi, terutama dalam pengelolaan data peserta, perencanaan program, dan pelaporan kegiatan secara terpadu

Upaya yang direkomendasikan untuk pencapaian kinerja PSSSDMKP ke depan antara lain:

- a. Meningkatkan keandalan sistem aplikasi sertifikasi, melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi dan perbaikan

manajemen layanan guna meminimalisir gangguan dan keterlambatan proses.

- b. Memperkuat integrasi data dan sistem informasi, dengan membangun platform terpadu yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program secara real time.
- c. Melakukan monitoring setiap triwulan pada Indikator Kinerja, guna memastikan bahwa capaian Indikator Kinerja dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja (LKj) ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja PSSSDMKP pada Triwulan berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja PSSSDMKP (5 Januari 2026)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bpsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. RitaTisiana Dwi Kuswardani**
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. RitaTisiana Dwi Kuswardani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tertsifikasi Kompetensi yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	80
		2	Persentase Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terekomendasi sesuai standar (%)	100
		3	Persentase Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi yang disusun sesuai regulasi yang berlaku (%)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, dan Akuntabel Dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PSSSDMKP (%)	86
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	92,1
		6	Penilaian Mandiri SAKIP PSSSDMKP (Nilai)	80
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PSSSDMKP (Nilai)	71,75
		8	Indeks Profesionalitas ASN PSSSDMKP (indeks)	81
		9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PSSSDMKP (%)	77
		10	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal PSSSDMKP (%)	100

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Rp 12.200.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Rp 6.568.162.000
Total Anggaran Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2026		Rp 18.768.162.000

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. RitaTisiana Dwi Kuswardani

Lampiran 2. Surat Tugas tentang Tim Pengelola Kinerja Organisasi dan Tim Pengelola Kinerja Pegawai PSSSDMKP Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

SURAT TUGAS NOMOR B. 155/BPPSDM .5/KP.440/II/2026

Menimbang : Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Satker Pusat Standardisasi Dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan TA 2026 Nomor SP DIPA 032.12.1.691629/2026 Revisi 1 tanggal 31 Desember 2025.

Memberi Tugas

Kepada : Pegawai sebagaimana terlampir

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengelola Kinerja Organisasi
 - a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), Perjanjian Kinerja, Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, dan Manual Indikator Kinerja Utama lingkup Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP;
 - b. Memastikan seluruh dokumen perencanaan kinerja diunggah dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - c. Melaksanakan pengukuran capaian indikator kinerja organisasi dan rencana aksi secara berkala;
 - d. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian indikator kinerja organisasi dan rencana aksi diunggah ke dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
- e. Menyusun laporan kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan);
 - f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - h. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu, dan diunggah ke dalam website resmi;
 - i. Menyiapkan data dukung Rekonsiliasi Kinerja dan Reviu LKj lingkup Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP;
 - j. Menyiapkan data dukung Penilaian mandiri SAKIP lingkup Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP; dan
 - k. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelolaan Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terkait pengelolaan kinerja organisasi.

2. Tim Pengelola Kinerja Pegawai

- a. Melakukan sosialisasi pengisian SKP yang telah terintegrasi dengan angka kredit bagi yang telah menduduki jabatan fungsional;
- b. Melakukan pemantauan terhadap penyusunan SKP pegawai secara triwulanan dan tahunan;
- c. Melakukan pemantauan terhadap pengisian rencana aksi, bukti dukung, dan hasil kinerja pegawai triwulanan dan tahunan; dan
- d. Melakukan penyelesaian laporan SKP pegawai dan pimpinan triwulanan dan tahunan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Jakarta, 20 Februari 2026
Kepala Pusat Standardisasi dan
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I Tim Pengelola Kinerja Organisasi
 Nomor : B.155/BPPSDM.5/KP.440/II/2026
 Tanggal : 20 Februari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI
 PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dimas Gondomarto Kusuma, S.E, M.AP	Kepala Sub bagian Tata Usaha
2	Irwan Fakhry, S.Pi	Perencana Ahli Madya
3	Delima Agustina, S.St.Pi	Penelaah Teknis Kebijakan
4	Anisa Fathir Rahman, S.Pi	Pranata Keuangan APBN Penyelia
5	Erki Herdian, S.Pi	Pengolah Data dan Informasi
6	Franciscus Edi Priyono, S.Pi	PPPK/Anggota Penjaminan Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi
7	Rizky Fauziah Sholihah, S.T.P	PPPK/Anggota Sertifikasi Kompetensi SDM KP

Kepala Pusat Standardisasi dan
 Sertifikasi Sumber Daya Manusia
 Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
 Secara Elektronik

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran II Tim Pengelola Kinerja Pegawai
 Nomor : B.155 /BPPSDM.5/KP.440/II/2026
 Tanggal : 20 Februari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI
 PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dimas Gondomarto Kusuma, S.E, M.AP	Kepala Sub bagian Tata Usaha
2	Merissa Nur Asih, S.I.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan
3	Ade Fitri Amalia, A.Md	Pengolah Data dan Informasi

Kepala Pusat Standardisasi dan
 Sertifikasi Sumber Daya Manusia
 Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
 Secara Elektronik

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 4. Link Bukti Dukung Capaian Kinerja PSSSDMKP

[https://bit.ly/Pengukuran PSSSDMKP Triwulan 1 2026](https://bit.ly/Pengukuran_PSSSDMKP_Triwulan_1_2026)

**Pusat Standardisasi Dan Sertifikasi Sumber daya
Manusia Kelautan Dan Perikanan**

**Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber
daya Manusia Kelautan Dan Perikanan**

 [@bppsdm_pusatsskp](https://www.instagram.com/bppsdm_pusatsskp)

 [@bppsdm_pusatsskp](https://twitter.com/bppsdm_pusatsskp)